



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 73 TAHUN
2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2021, telah diatur Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD, ayat (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, ayat (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah, ayat (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD, ayat (5)

Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran, ayat (6) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD dan ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga, dinyatakan bahwa belanja keperluan mendesak lainnya, kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan dan/atau kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah, perlu menggeser belanja langsung ke Belanja Tidak Terduga;
- d. bahwa penambahan pendapatan di Pendapatan Dana Dana Transfer Khusus, penggeseran Belanja Tidak Terduga, pencantuman anggaran dari DAK-Non Fisik Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, penataan rekening Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara di Perangkat Daerah, dan penyesuaian rekening di Perangkat Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK'07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Dampaknya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga;

12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2017;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp1.711.918.206.505,00 bertambah sebesar Rp666.113.000,00 sehingga menjadi Rp1.712.584.319.505,00 dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan :			
a. Semula	Rp.	1.570.130.005.096,00	
b. Bertambah	Rp.	666.113.000,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 1.570.796.118.096,00
2 Belanja :			
a. Semula	Rp.	1,656.681.372.069,00	
b. Bertambah	Rp.	666.113.000,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 1.657.347.485.069,00
Defisit			Rp. (86.551.366.973,00)
3 Pembiayaan :			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	141.788.201.409,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 141.788.201.409,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	55.236.834.436,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp. 55.236.834.436,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan			Rp. 86.551.366.973,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp.	246.596.642.331,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.		246.596.642.331,00
b. Pendapatan Transfer			
1. Semula	Rp.	1.275.072.282.765,00	
2. Bertambah	Rp.	666.113.000,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.		1.275.738.395.756,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp.	48.461.080.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.		48.461.080.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah			
1. Semula	Rp.	85.341.500.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.		85.341.500.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah			
1. Semula	Rp.	8.695.050.789,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		8.695.050.789,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1. Semula	Rp.	13.245.310.190,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		13.245.310.190,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1. Semula	Rp.	139.314.781.352,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.		139.314.781.352,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			
1. Semula	Rp.	1.139.186.194.295,00	
2. Bertambah	Rp.	666.113.000,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp.		1.139.852.307.295,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah			
1. Semula	Rp.	135.886.088.470,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan	Rp.		135.886.088.470,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis:

a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	Rp.	7.190.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.		7.190.000.000,00
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan			
1. Semula	Rp.	41.271.080.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.		41.271.080.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Operasi			
1. Semula	Rp.	1.240.067.217.430,00	
2. Bertambah	Rp.	4.726.502.000,00	
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp.		1.244.793.719.430,00
b. Belanja Modal			
1. Semula	Rp.	216.385.337.588,00	
2. Berkurang	Rp.	49.005.000,00	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.		216.434.342.588,00
c. Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp.	21.389.082.430,00	
2. Bertambah	Rp.	4.109.394.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.		17.279.688.430,00
d. Belanja Transfer			
1. Semula	Rp.	178.839.734.621,00	
2. Berkurang / (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp.		178.839.734.621,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah			
1. Semula	Rp.	699.953.566.169,00	
2. Bertambah	Rp.	4.706.152.000,00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		704.659.718.169,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp.	444.545.615.597,00	
2. Bertambah	Rp.	20.350.000,00	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.		444.565.965.597,00

c. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp.	79.143.614.964,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 79.143.614.964,00
d. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp.	16.424.420.700,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp. 16.424.420.700,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah			
1. Semula	Rp.	411.549.700,00	
2. Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan			Rp. 431.549.700,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1. Semula	Rp.	59.833.195.481,00	
2. Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan			Rp. 59.833.195.481,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1. Semula	Rp.	47.596.377.796,00	
2. Berkurang	Rp.	49.005.000,00	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan			Rp. 47.645.382.796,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi			
1. Semula	Rp.	103.840.781.241,00	
2. Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan			Rp. 103.840.781.241,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
1. Semula	Rp.	4.703.433.370,00	
2. Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya setelah perubahan			Rp. 4.703.433.370,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:

Belanja Tidak Terduga			
1. Semula	Rp.	21.389.082.430,00	
2. Berkurang	Rp.	4.109.394.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp. 17.279.688.430,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Bagi Hasil			
1. Semula	Rp.	11.642.410.821,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp. 11.642.410.821,00

b. Belanja Bantuan Keuangan			
1. Semula	Rp.	167.197.323.800,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.		167.197.323.800,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp.	141.788.201.409,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.		141.788.201.409,00
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp.	55.236.834.436,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.		55.236.834.436,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya			
1. Semula	Rp.	141.788.201.409,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.		141.788.201.409,00
b. Pencairan Dana Cadangan			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah :			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.		0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah :			
1. Semula	Rp.	0,00	
2. Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	55.236.834.436,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan			Rp. 55.236.834.436,00

c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan			Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan			Rp. 0,00

Pasal 5

Ringkasan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 23 November 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 23 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 81